

Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Moderasi Alokasi Belanja Modal

Linawati¹, Suhardi²

^{1, 2)} Program Studi Akuntansi, Universitas Nusantara PGRI Kediri
Email: linawati@unpkediri.ac.id, suhardi@unpkediri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh kemandirian dan efektivitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota dan Kabupaten Se-Eks Karesidenan Kediri. (2) Mengetahui pengaruh alokasi belanja modal sebagai moderator kemandirian dan efektivitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota dan Kabupaten Se-Eks Karesidenan Kediri. Data dalam penelitian ini, meliputi data APBD dan realisasinya, serta pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah yang berjumlah 7 kota dan kabupaten. Analisis data dilakukan dengan analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota/ Kabupaten Se-eks Karesidenan Kediri, sedangkan Efektivitas keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota/ Kabupaten Se-eks Karesidenan Kediri, (3) Alokasi belanja modal memoderasi kemandirian dan efektivitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota/ Kabupaten Se-eks Karesidenan Kediri.

Kata Kunci: belanja modal, kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi.

Pendahuluan

Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola pemerintahan secara mandiri dengan memberdayakan sumber-sumber yang dimiliki dan penggunaannya harus berpihak pada kepentingan masyarakat dan mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Otonomi daerah memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerah secara lebih optimal. Pengelolaan daerah harus dilakukan secara optimal. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah. Menurut Astuti (2015) pemerintah daerah memerlukan penilaian untuk melihat apakah pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara efisien dan efektif

dengan cara menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD).

Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat dalam anggaran. Menurut Halim (2007), perbandingan antara komponen – komponen yang terdapat pada anggaran diukur dengan menggunakan beberapa rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD meliputi rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Sari, dkk (2015) pertumbuhan merupakan suatu rangkaian proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan dari kegiatan perekonomian yang berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin meningkat sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Makin tinggi pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan aset tetap seperti infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian. Dalam pemerintah daerah penambahan aset tetap dilakukan melalui pengalokasian belanja modal. Sandri (2016), belanja modal adalah jumlah realisasi seluruh belanja pembangunan seperti infrastruktur, investasi baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Belanja modal meliputi belanja tanah, gedung dan bangunan, belanja peralatan dan mesin, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya. Adapun menurut Halim (2007) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dengan pengalokasian belanja

modal yang meningkat diharapkan pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat. Pengalokasian belanja modal tentunya tidak terlepas dari pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Beberapa peneliti yang melakukan penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi memberikan hasil yang bervariasi. Hasil penelitian Hamzah (2008) dan Astuti (2015) menunjukkan rasio kemandirian dan rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektivitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun penelitian Annisa (2011) menunjukkan bahwa rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada. Infrastruktur, sarana dan prasarana dalam APBD tertuang dalam alokasi belanja modal. Kinerja keuangan pemerintah dengan pengalokasian belanja modal yang cukup akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Hasil penelitian Sukarmi dan IGA (2016) menunjukkan secara umum alokasi belanja modal memperkuat pengaruh kinerja keuangan pada pertumbuhan ekonomi. Secara khusus interaksi alokasi belanja modal memperkuat pengaruh tingkat ketergantungan keuangan dan kemandirian keuangan pada pertumbuhan ekonomi. Adapun pengaruh desentralisasi, efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD pada pertumbuhan ekonomi dengan interaksi alokasi belanja modal tidak berpengaruh signifikan. Adapun hasil penelitian Prihastuti dkk (2015) menunjukkan kinerja keuangan daerah mempengaruhi alokasi belanja modal, alokasi belanja modal tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut kinerja keuangan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Kota dan Kabupaten Se-Eks Karesidenan Kediri adalah kota dan kabupaten yang mempunyai berbagai potensi alam, serta budaya yang sangat beragam. Selama beberapa tahun belakang data di dpjk departemen keuangan menunjukkan realisasi belanja modal pada pemerintah Kota dan Kabupaten Se-Eks Karesidenan Kediri berfluktuasi. Hal tersebut juga pada pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) pengaruh kemandirian dan efektivitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota dan Kabupaten Se-Eks Karesidenan Kediri. (2) Mengetahui pengaruh alokasi belanja modal sebagai moderator kemandirian dan efektivitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota dan Kabupaten Se-Eks Karesidenan Kediri.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang dipergunakan adalah data laporan

APBD dan realisasinya, serta Produk Domestik Regional Bruto Kota dan Kabupaten Se-Eks Karesidenan Kediri Kediri tahun 2011-2016. Data diperoleh dari situs www.bpsjawatimur.go.id. Daerah yang dijadikan objek penelitian sebanyak 7 daerah, yaitu Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, dan Kabupaten Blitar.

Variabel dalam penelitian ini terdapat empat variabel. Variabel bebasnya adalah kemandirian keuangan daerah (X_1) dan efektivitas keuangan daerah (X_2), sedangkan variabel terikatnya adalah pertumbuhan ekonomi (Y). Variabel moderasinya adalah belanja modal (X_3). Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan variabel moderasi, atau uji *Moderated Regression Analysis (MRA)*, dengan model uji interaksi. Adapun kriteria pengujian, H_a diterima dan H_o ditolak apabila signifikansi $< 0,05$. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan SPSS *relase 23,0*.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Karisidenan Kediri (dalam bahasa Belanda: *Residentie Kediri*) adalah sebuah wilayah administratif karesidenan yang terletak di Jawa Timur. Karesidenan Kediri diserahkan pemerintahan Hindia Belanda dari Kerajaan Mataram pada tahun 1830, setelah berakhirnya Perang Diponegoro. Kemudian pada tahun 1957 pemerintah Republik Indonesia menghapus karesidenan sebagai pembagian administratif negara. Daerah Karesidenan Kediri terdiri dari kota dan kabupaten berikut ini: (1) Kota Kediri, (2) Kota Blitar, (3) Kabupaten Kediri, (4) Kabupaten Blitar, (5) Kabupaten Nganjuk, (6) Kabupaten Trenggalek, (7) Kabupaten Tulungagung.

Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun propinsi serta pinjaman daerah.

Tabel 1: Rasio Kemandirian Kota/ Kabupaten Se-Eks Karisidenan Kediri

Kota/ Kabupaten	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Blitar	6,67	7,76	8,05	11,62	12,14	11,79
Kabupaten Kediri	8,11	8,91	12,76	16,80	16,21	16,81
Kabupaten Trenggalek	7,32	7,33	7,05	10,16	11,82	13,04
Kabupaten Nganjuk	9,15	10,17	10,89	16,31	17,05	18,35
Kabupaten Tulungagung	10,88	12,21	11,29	16,28	16,62	16,59
Kota Blitar	12,02	13,34	13,50	17,12	19,59	19,16
Kota Kediri	19,49	16,98	17,38	21,20	23,06	25,83

Sumber: data diolah

Efektivitas keuangan daerah dilihat dari efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan).

Tabel 2: Rasio Efektivitas Kota/ Kabupaten Se-Eks Karisidenan Kediri

Kota/ Kabupaten	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Blitar	114,54	124,33	120,42	139,79	122,44	114,80
Kabupaten Kediri	162,35	155,68	161,24	155,29	115,13	116,22
Kabupaten Trenggalek	103,30	104,34	96,09	121,77	125,11	128,10
Kabupaten Nganjuk	111,55	126,84	129,71	127,28	121,23	115,04
Kabupaten Tulungagung	144,11	146,75	143,78	151,60	145,37	142,45
Kota Blitar	107,02	115,74	129,24	136,58	147,10	121,96
Kota Kediri	135,34	120,74	113,86	150,97	172,47	124,30

Sumber: data diolah

Alokasi belanja modal menunjukkan perbandingan alokasi belanja modal dengan total belanja yang dilakukan selama satu periode.

Tabel 3: Alokasi belanja modal kota/ kabupaten se-eks karisidenan Kediri

Kota/ Kabupaten	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Blitar	13,86	16,37	20,28	22,00	24,53	29,25
Kabupaten Kediri	17,02	20,34	18,39	17,80	20,13	23,39
Kabupaten Trenggalek	13,49	12,94	17,80	20,57	21,07	21,22
Kabupaten Nganjuk	10,11	13,66	16,41	15,99	18,21	20,34
Kabupaten Tulungagung	10,64	13,92	9,49	16,04	19,19	22,04
Kota Blitar	30,94	17,55	18,02	19,17	21,52	23,71
Kota Kediri	14,63	22,50	14,29	15,67	15,57	25,72

Sumber : data diolah

Rasio pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbandingan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sedang berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya.

Tabel 4: Pertumbuhan ekonomi kota/ kabupaten se-eks karisidenan Kediri

Kota/ Kabupaten	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Blitar	5,43	5,62	5,06	5,02	5,05	5,09

Kabupaten Kediri	6,03	6,11	5,82	5,32	4,88	5,02
Kabupaten Trenggalek	5,94	6,21	6,00	5,28	5,03	5,00
Kabupaten Nganjuk	5,75	5,85	5,40	5,10	5,18	5,29
Kabupaten Tulungagung	6,37	6,47	6,13	5,46	4,99	5,02
Kota Blitar	6,43	6,52	6,50	5,88	5,68	5,76
Kota Kediri	4,29	5,27	3,52	5,85	5,36	5,50

Sumber: BPS Jawa Timur, 2016.

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar satu variabel bebas dan variabel moderasi secara parsial dapat menjelaskan variasi variabel terikat. Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan hasil nilai signifikan dengan $\alpha = 0,05$. Sebelum melakukan uji Regresi terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat regresi, yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinieritas. Hasil pengujian hipotesis dilakukan dengan uji interaksi *Moderated Regression Analysis (MRA)*, disajikan dalam tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5 : Hasil uji *Moderated Regression Analysis* (Uji Interaksi)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,050	2,631		,399	,692
	x1	-,316	,084	-2,404	-3,745	,001
	x2	,069	,023	1,997	3,048	,004
	x3	,220	,149	1,681	1,484	,147
	x13	,014	,004	2,672	3,200	,003
	x23	-,003	,001	-3,192	-2,608	,013

a. Dependent Variable: y

Berdasarkan nilai koefisien yang terdapat pada tabel di atas, maka dapat dibuat rumus regresinya sebagai berikut:

$$Y = 1,050 - 0,316X_1 + 0,069 X_2 + 0,220 X_3 + 0,014 X_{13} - 0,003 X_{23}$$

Berdasarkan rumus tersebut penjelasan persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konstanta bernilai positif sebesar 1,050 artinya interaksi alokasi belanja modal terhadap variabel kemandirian dan efektivitas keuangan daerah dalam keadaan konstan, maka pertumbuhan ekonomi bernilai 1,050.
2. Koefisien regresi pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif sebesar 0,316. Artinya, apabila kemandirian keuangan daerah

- meningkat satu satuan, maka akan menyebabkan penurunan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,316.
3. Koefisien regresi pengaruh efektivitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif sebesar 0,069. Artinya, apabila kemandirian keuangan daerah meningkat satu satuan, maka akan menyebabkan kenaikan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,069.
 4. Koefisien interaksi alokasi belanja modal terhadap pengaruh kemandirian keuangan daerah sebesar 0,014. Artinya jika kemandirian keuangan daerah dan alokasi belanja modal konstan, maka kenaikan moderasi akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,014.
 5. Koefisien interaksi alokasi belanja modal terhadap pengaruh efektivitas keuangan daerah sebesar -0,003. Artinya jika efektivitas keuangan daerah dan alokasi belanja modal konstan, maka kenaikan moderasi akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,003.

Dasar pengambilan keputusan untuk uji t parsial dengan berdasarkan pada nilai signifikansi. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai sig < 0,05 maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, dan (2) jika nilai sig > 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Dengan melihat pada tabel 4.8 di atas, nilai signifikansi interaksi variabel kemandirian dengan belanja modal sebesar $0,003 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa alokasi belanja modal memoderasi kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun nilai signifikansi interaksi variabel efektivitas keuangan daerah sebesar $0,013 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa alokasi belanja modal memoderasi efektivitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan

Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah yang diprosikan dengan rasio kemandirian dan efektivitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda. Rasio kemandirian mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Siregar (2016) yang menunjukkan hasil bahwa rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Ani dan Dwirandra (2014), Astuti (2015) dan Sari dkk (2015) yang membuktikan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemandirian keuangan daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemandirian pemerintah daerah akan memainkan peran yang penting untuk penyediaan layanan publik, yang nantinya mendorong pertumbuhan ekonomi. Rasio kemandirian yang semakin tinggi, mengisyaratkan bahwa penerimaan PAD tinggi. Dengan PAD yang tinggi akan

memberikan perkembangan yang pesat karena daerah semakin maju dan berkembang perekonomiannya, sehingga akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi

Rasio efektivitas keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini bertentangan dengan penelitian Astuti (2015), Sari dkk (2015) dan Siregar (2016), yang membuktikan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak berpengaruhnya rasio efektivitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dikarenakan capaian target dengan realisasinya tidak terlalu besar dalam melampaui target.

Alokasi belanja modal sebagai variabel moderasi pengaruh rasio kemandirian dan efektivitas menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Alokasi belanja modal mampu memoderasi interaksi rasio kemandirian dan rasio efektivitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemandirian keuangan daerah diwujudkan dengan kontribusi PAD lebih besar untuk alokasi belanja daerah daripada kontribusi dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah. Semakin besar PAD maka peluang untuk meningkatkan belanja modal juga semakin besar. Belanja modal dapat menambah volume kegiatan ekonomi daerah. Dengan adanya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana akan memperkuat dan meningkatkan kegiatan perekonomian. Meningkatkan kegiatan ekonomi berpengaruh pada produktivitas perekonomian. Dengan adanya peningkatan produktivitas maka akan meningkatkan pendapatan daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sukarmi dan IGA (2016), membuktikan bahwa interaksi alokasi belanja modal memperkuat pengaruh tingkat ketergantungan keuangan dan kemandirian keuangan pada pertumbuhan ekonomi. Nilai PAD yang merupakan representasi dari kemandirian daerah, maka daerah mempunyai lebih banyak sumber dana untuk membiayai belanja pembangunannya. Belanja pembangunan merupakan bentuk dari investasi yang menjadi determinan penting bagi laju peningkatan perekonomian.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kinerja keuangan dengan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota/ Kabupaten Se-eks Karesidenan Kediri. Kinerja keuangan dengan rasio efektivitas keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota/ Kabupaten Se-eks Karesidenan Kediri. Alokasi belanja modal berpengaruh signifikan dalam memoderasi rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota/ Kabupaten Se-eks Karesidenan Kediri.

Saran

Hasil uji MRA penelitian ini menunjukkan nilai koefisien β dari interaksi antara

variabel independen dengan variabel moderasi sangat kecil. Peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan variabel lainnya dalam memprediksi laju pertumbuhan ekonomi serta memperluas sampel penelitian.

Daftar Pustaka

1. Ani, N. L. N. P dan A.A.N.B Dwirandra. 2014. *Pengaruh kinerja keuangan daerah pada pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan Kabupaten dan Kota*. E-Jurnal akuntansi Universitas Udayana 6 (3): 481-497.
2. Annisa, G.R. 2011. *Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia, pengangguran dan kemiskinan dengan kinerja keuangan sebagai variabel anteseden (studi kasus pada pemerintah daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur)*. Skripsi tidak dipublikasikan Fakultas Ekonomi Akuntansi UII Yogyakarta.
3. Aštuti, W. 2015. *Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap pengangguran dan kemiskinan (studi pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa periode 2007-2011)*. Jurnal EBBANK. 6(1): 1-18.
4. Halim, A. 2007. *Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
5. Halim, A., dan Muhammad, S.K. 2014. *Akuntansi keuangan daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
6. Hamzah, A. 2008. *Analisa kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan: pendekatan analisis jalur (studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Propinsi Jawa Timur periode 2001-2006)*. Jurnal SNA XI Pontianak. Online. Diakses pada tanggal 23 Januari 2017.
7. <http://bps.jawatimur.go.id>.
8. Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: STIM YKPN.
9. Prihaštuti, dkk. 2015. *Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/ Kota Riau*. Jurnal Sorot, 10(2): 143-154.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
11. Sandri, dkk. 2016. *Kemampuan alokasi belanja modal memoderasi pengaruh kinerja*

keuangan daerah pada indeks pembangunan manusia. Jurnal Buletin Studi ekonomi 21(1): 71-81.

12. Sari, dkk. 2015. *Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan di Sulawesi Utara tahun 2004-2014*. Online. Diakses pada tanggal 25 Januari 2017. <http://ssrn.com/abstract=2115816>.
13. Siregar, H. A. 2016. *Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dengan belanja modal sebagai variabel pemoderasi*. KURS 1(1): 140-152.
14. Sukarmi, N.W., dan Iga, N.B. 2016. *Alokasi belanja modal sebagai pemoderasi pengaruh kinerja keuangan pada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi dan bisnis Universitas Udayana. 5 (3): 545-572